DEMOKRASI DI INDONESIA

Elma Lufita Umara

Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia

elmaluvitaumaraumra@gmail.com

Abstrak

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat

1. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-

nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. Kasus/Masalah

Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksana kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan dibidang kekuasaan lainnya.
2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lajim disebut parlemen (lembaga legislatif), haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali.
3. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Diantaranya tidak boleh ada pemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan UUD atau UU walau dengan lasan apapun.
4. Harus ada UU yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya

3. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat:
 - a. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara.
 - b. Demokrasi tidaklangsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen.
2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara.

- a. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat diparlemen namun tetap di kontrol oleh referendum.
- b. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang didalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif.
- c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi dimana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen.
- d. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan/tidak langsung dan demokrasi secara langsung

3. Berdasarkan prinsip ideologi

- a. Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum.
- b. Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dri paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum.
- c. Demokrasi pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum.

4. Pembahasan

Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanan republik indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi (pasang surut). Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural.

Menurut Juliardi fluktuasi demokrasi Indonesia pada hakekatnya dapat dibagi dalam 5 periode:

1. Periode 1945-1949 dengan sistem demokrasi Pancasila pada periode ini sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.
2. Periode 1949-1959 dengan sistem demokrasi parlementer periode ini sangat menonjolkan peranan parlemen dan partai politik.
3. Periode 1959-1965 dengan sistem demokrasi terpimpin, sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dari konstitusional periode ini juga sering disebut dengan orde lama.
4. Periode 1965-1998 dengan sistem demokrasi Pancasila (orde baru), demokrasi Pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang meniadakan sistem peredensial.
5. Periode 1998-sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila (orde reformasi) demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multi partai yang berupaya mengembalikan keseimbangan kekuatan antar lembaga negara

5. Kesimpulan

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Kata “demokrasi” seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, di antara banyaknya pengertian yang berbeda terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Hendry B. Mayo, misalnya, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak.

Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem

demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap di kontrol oleh referendum.

Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif

6. Daftar Pustaka

Gianto, Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan,
Sidoarjo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Lubis Maulana arafat, pembelajara PPKn di SD/MI, Medan: Akasha
Sakti, 2018

Nadrilun, mengenal lebih dekat demokrasi di Indonesia, jakarta Timur: PT
Balai Pustaka, 2012.

Umara, E. L. (2021). PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN DI MUSIM
PANDEMI COVID-19

Umara, E. L. (2021). Toleransi antar umat beragama dalam memperkokoh persatuan
dan kesatuan bangsa.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media
Publishing.

Sodik, M. A., & Nzilibili, S. M. M. (2017). The Role Of Health Promotion And Family
Support With Attitude Of Couples Childbearing Age In Following Family Planning
Program In Health. *Journal of Global Research in Public Health*, 2(2), 82-89.

Sodik, M. A. (2018). Merokok & Bahayanya.

Sodik, M. A., Suprpto, S. I., & Pangesti, D. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan
Dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Di Rsui Orpeha
Tulungagung. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(1), 24-32.

Setyani, A. T., & Sodik, M. A. (2018). Pengaruh Merokok Bagi Remaja Terhadap
Perilaku dan Pergaulan Sehari-hari.

Attoriq, S., & Sodik, M. A. (2018). Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Terkait
Pelayanan Kesehatan Di Lahan Praktik.

Oktoriani, E. N., Sutrisno, J., Mayasari, E., & Sodik, M. A. (2018). Analysis of medical record complete flexibility to complete claims of health BPJS RS Baptis Kota Batu. *Journal of Global Research in Public Health*, 3(1), 46-53.